

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah telah menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaan dengan menerbitkan diantaranya antara lain Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagai salah satu kosekuensinya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat sampai desa). Salah satu persyaratan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang baik dan benar. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi *akuntable* secara publik. Menurut Sofyan (2008:201) berpendapat bahwa, laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi.

Laporan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai bahan pertanggungjawaban. Tahapan berikutnya pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa

wajib membuat atau menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintah desa selama periode anggaran pemerintah desa terkait. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat.

Sistem Informasi Akuntansi secara umum sudah diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 86 yang berjudul “Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan”. Sistem informasi desa ini meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Tanggung jawab pengembangan sistem informasi desa ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/kota. Informasi yang dikelola dalam sistem tersebut adalah informasi umum yang cenderung lebih luas dan berbeda-beda ragamnya antar kabupaten, sesuai dengan perbedaan fokus pembangunan di daerah masing-masing. Sedangkan pembahasan sistem informasi akuntansi adalah spesifik dan mempunyai standar yang sama pada seluruh desa di Indonesia seperti masa sebelumnya diatur oleh Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Karena dilihat dari sisi *Internal*, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan

unit kerja pemerintah daerah ke desa yang harus membuat laporan keuangan sebagai bukti telah melakukan berbagai transaksi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan, Sedangkan dilihat dari sisi *eksternal*, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat umum atau masyarakat luas.

Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain: Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan. Mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Akuntansi dan sistem informasi sangat berkaitan erat dimana kaitan yang erat ini tercermin dalam penggunaan istilah informasi akuntansi yang menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam institusi. Akuntansi sebagai sistem informasi ekonomi dan keuangan mampu memberikan manfaat bagi pemakai, agar informasi akuntansi dapat diolah secara baik, diperlukan suatu mekanisme atau kegiatan yang baik pula. Sistem pengolahan

yang baik terdiri dari prosedur, metode atau cara dan teknik yang memungkinkan data ini akan melibatkan manusia sebagai penunjang pencapaian tujuan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus dapat memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam hal melakukan laporan keuangan, karena sistem yang berbasis komputer sudah dirancang untuk mengumpulkan, memproses, mencatat serta mengolah transaksi-transaksi data sehingga menghasilkan informasi untuk disajikan bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Teknologi sistem informasi akuntansi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, sistem informasi akuntansi juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Dengan menggunakan komputerisasi lebih efektif

dibandingkan dengan menggunakan catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas.

Informasi keuangan desa adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan desa yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Informasi keuangan desa yang disampaikan oleh desa kepada pemerintah. Sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa agar dapat dipertanggungjawabkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan Pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan memberi judul penelitian ini dengan judul **“Evaluasi Penerapan Akuntansi Dana Desa dan Pemanfaatan (SISKEUDES) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi dana desa di desa-desa Kecamatan Bakam?
2. Bagaimana pemanfaatan SISKEUDES di desa-desa Kecamatan Bakam?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar masalah tidak terlalu luas, sehingga pembahasan terarah dan terfokus. Penelitian ini di fokuskan pada penerapan Akuntansi Dana Desa, Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) dan kualitas laporan keuangan desa di desa-desa Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan penerapan Akuntansi dana desa di desa-desa Kecamatan Bakam.
2. Untuk menggambarkan pemanfaatan SISKEUDES di desa-desa Kecamatan Bakam.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu akuntansi, khususnya yang terkait dengan judul penelitian.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Desa menyangkut kualitas laporan keuangan desa, terutama dalam penerapan sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan sistem keuangan desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mendeskripsikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mendeskripsikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, tentang sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Menggunakan metode kualitatif, yang menjelaskan desain penelitian, data yang di perlukan, informan/responden dan cara membentuknya, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasannya.

BAB V: PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

